

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*

**(Kajian Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2010)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Aditya Taruna Wijaya
NIM. C2C309003

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Aditya Taruna Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : C2C309003
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE
AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*
(Kajian Empiris Pada Perusahaan Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2010)**
Dosen Pembimbing : Surya Rahardja S.E., M.Si., Akt

Semarang, 24 April 2012

Dosen Pembimbing,

(Surya Rahardja S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 197605252006041002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Aditya Taruna Wijaya

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309003

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE
AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*
(Kajian Empiris Pada Perusahaan Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2010)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal.....2012

Tim Penguji

1. Surya Rahardja S.E., M.Si., Akt. (.....)

2. Haryanto S.E., M.Si., Akt. (.....)

3. Aditya Septiani S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Aditya Taruna Wijaya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* (Kajian Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 24 April 2012
Yang membuat pernyataan,

(Aditya Taruna Wijaya)
NIM : C2C309003

ABSTRACT

The role of audit committee is to ensure the quality of financial reporting process. The purpose of this research is to examine the influence of audit committee characteristic () to company's audit report lag.

The Data of this research are taken from 200 companies listed in Bursa Efek Indonesia in 2010. Data about the audit committee information are taken from the company's annual report. Then, the data are analyzed using multiple regression linear analysis.

The result of this research shows that audit committee size and audit committee expertise has significant influence to reduce audit report lag, while the others audit committee characteristic not.

Keyword :Audit Committee, Corporate Governance, Audit Report Lag.

ABSTRAK

Peran dari komite audit adalah memastikan kualitas dari proses pelaporan keuangan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh dari karakteristik yang ada pada komite audit (independensi anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, kompetensi anggota komite audit, dan jumlah anggota komite audit) terhadap *audit report lag* perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data dari 200 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Data mengenai informasi komite audit diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota koite audit dan kompetensi anggota komite audit mempunyai pengaruh signifikan dalam mengurangi *audit report lag*. Sementara karakteristik komite audit lainnya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi *audit report lag*.

Kata Kunci : Komite Audit, Tata Kelola Perusahaan, *Audit Report Lag*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan Skripsi dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* (Kajian Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)”**, dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini dapat tersusun atas bantuan dan perhatian berbagai pihak, yang telah dengan baik hati bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi serta senantiasa memberikan semangat sehingga konsistensi selalu terjaga selama pengerjaan Skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. H. M. Syafruddin, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, SE., M.Si., Akt. selaku dosen wali. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan selama perwalian.
4. Bapak Surya Rahardja SE., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing, atas segala arahan, bimbingan, serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Mbah kakung, Mbah putri, Ibu (Alm), Mbak Pipit, dan Mas Danang, terima kasih atas dukungan serta doanya yang selalu menjadi penguatku.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, yang sudah banyak berbagi ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

7. Bapak Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah adminisrasi perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik, Bagus, Nugroho, Beta, atas semua motivasi dan saran yang diberikan.
9. Sahabat-sahabat Ranger / Preman kimpul, Aji, Akin, Habib, Wahyu, Daud, Johar, yang menjadi teman seperjuangan di UNDIP.
10. Teman-teman Akuntansi Reg 2 transfer atas semua cerita kita. Terlalu banyak kenangan bersama kalian teman-teman.
11. Teman-teman KKN Randu Garut, Rendy, Sanusi, Syahrul, Fara, Veera, Laras, Astri, Mbak Aan n Mas Ari, Mbak Puji, Tedy, Dody, Meka, terimakasih atas semua tawa dan tangis yang kalian berikan, semoga persahabatan kita tidak hanya sebatas Randu Garut.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dapat disampaikan sehingga menjadikan Skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi yang membaca ataupun pihak yang memerlukannya.

Semarang, 24 April 2012

Penulis,

Aditya Taruna Wijaya
C2C309003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERESETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Model Penelitian	42
2.4. Pengembangan Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	47

3.2. Populasi dan Sampel	51
3.3. Jenis dan Sumber Data	52
3.4. Metode Pengumpulan Data	52
3.5. Metode Analisis	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	60
4.2. Analisis Data	63
4.3. Interpretasi Hasil	77
BAB V PENUTUP	82
5.1. Simpulan	82
5.2. Keterbatasan	83
5.3. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 38
Tabel 4.1	Jumlah Populasi 60
Tabel 4.2	Perhitungan Sampel 62
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif 64
Tabel 4.4	Pengujian Multikolinieritas dengan VIF 70
Tabel 4.5	Uji Glejser 71
Tabel 4.6	Hasil Uji Regresi 72
Tabel 4.7	Hasil Uji F 73
Tabel 4.8	Hasil Koefisien Determinasi 74
Tabel 4.9	Hasil Uji t 75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian	42
Gambar 4.1 Pengujian Normalitas - 1	68
Gambar 4.2 Pengujian Normalitas - 2	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Sampel Penelitian	89
LAMPIRAN B Hasil Output SPSS	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara manajemen (intern perusahaan) dengan pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi akan membantu semua pengguna untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas serta membantu dalam membuat keputusan ekonomi (Haron *et al.*, 2006 dalam Sari, 2011). Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan seperti pihak manajemen, pemegang saham, investor, pemerintah, dan kreditor. Namun demikian, di pasar modal pengguna utama dari laporan keuangan adalah investor, karena dengan melihat laporan keuangan yang dipublikasikan mereka dapat memantau kinerja perusahaan-perusahaan *go public*.

Informasi yang ada di dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh investor dalam pengambilan keputusan ekonomi, oleh sebab itu laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi empat karakteristik kuantitatif yang membuat laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2007 dalam Sari, 2011). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang

relevan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan. Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan nilai informasinya, karena tidak tersedia saat pemakai laporan keuangan membutuhkan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diatur di dalam PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan paragraph 43, yaitu bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan public yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tersebut juga harus memenuhi empat karakteristik kuantitatif yang membuat laporan keuangan berguna bagi pemakainya, yaitu *relevance*, *reliable*, *comparability*, dan *consistency*.

Keinginan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satu kendala adalah adanya keharusan laporan keuangan untuk di audit oleh akuntan publik. Tujuan audit adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan, artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perlu verifikasi apakah telah sesuai dengan standar pelaporan yang berterima umum.

Badan Pengawas Pasar Modal mewajibkan laporan keuangan harus diaudit karena laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik saham dan juga bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. Sedangkan tugas auditor adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, auditor harus memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut (Mulyadi, 2002 dalam Sari, 2011). Hasil audit atas perusahaan publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Adanya tanggung jawab yang besar ini memacu auditor untuk bekerja secara lebih profesional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan. Prosedur ini mengatur hal-hal seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan (IAI, 2001 dalam Sari, 2011).

Namun demikian, pemenuhan standar audit tidaklah mudah. Pemenuhan standar ini berdampak pada lamanya penyelesaian laporan audit. Selain itu, berdampak pula pada kualitas hasil laporan keuangan auditan. Kondisi ini dapat menimbulkan suatu dilema bagi auditor. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Ketepatan

waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada Bapepam tergantung dari lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Semakin cepat pekerjaan audit selesai dilakukan, maka semakin cepat pula informasi dipublikasikan.

Manajemen perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan keuangan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevan dan keandalan kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan (IAI, 2001 dalam Sari, 2011).

Dyer dan McHugh, 1974 (dalam Sari, 2011) menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Para pemakai informasi akuntansi tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan pembuatan keputusan, tetapi informasi juga harus bersifat baru. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan.

Selisih waktu antara tanggal tutup tahun buku dengan tanggal pelaporan auditor dalam laporan keuangan auditan menunjukkan lamanya waktu penyelesaian

audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini dalam auditing disebut *audit report lag*. Semakin lama *audit report lag* maka semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Bursa Malaysia mengindikasikan bahwa salah satu mekanisme Corporate Governance yaitu komite audit berperan penting di dalam pencapaian tujuan dari Bursa Malaysia agar ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat tercapai (Hashim Rahman, 2011). Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Keberadaan Komite Audit dan Komisaris Independen pada perusahaan public di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No.Kep-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) wajib memiliki Komite Audit dan Komisaris Independen. Peraturan ini secara efektif

diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan publik yang mencatatkan diri di BEJ yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi.

Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 menjelaskan komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau perusahaan public.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hashim dan Rahman (2011) yang menguji pengaruh dari komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia. Mereka menggunakan variabel-variabel independen komite audit seperti, *Audit committee independence*, *Audit committee meeting*, *Audit committee expertise*, dan variabel kontrol seperti, *Company size*, *Type of audit firm*, dan *Profitability*. Penelitian ini mereplikasi beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu *Audit committee independence*, *Audit committee meeting*, *Audit committee expertise*, dan variabel kontrol seperti, *Company size*, *Type of audit firm*, dan *Profitability*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hashim dan Rahman (2011) adalah lingkungan penelitian yang sebelumnya dilakukan di Malaysia, kali ini penelitian di lakukan di Indonesia. Perbedaan selanjutnya adalah penambahan satu lagi variabel independen yaitu *Audit committee size*. *Audit committee size* dalam suatu perusahaan didefinisikan sebagai jumlah anggota komite audit. Bapepam (2004) dan Bursa Efek Jakarta (2000) mengatur bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Namun, jumlah anggota komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini memunculkan pemikiran bahwa semakin banyak

jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi *audit report lag*, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan atau *power* yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty, 1993 dalam Abawayya 2010), menerima lebih banyak sumber daya (Pincus *et al.*, 1989 dalam Hoitash dan Hoitash, 2007), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo *et al.*, 2003 dalam Abawayya 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nor *et al.* (2010) *Audit committee size* berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*, hal inilah yang menjadi alasan peneliti menambahkan variabel *Audit committee size* ke dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul sebagai berikut:

“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* (Kajian Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit committee independence* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
2. Apakah *audit committee meeting* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?

3. Apakah *audit committee expertise* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
4. Apakah *Audit committee size* mempunyai pengaruh pada *Audit report lag* perusahaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara karakteristik komite audit yaitu, *Audit committee independence*, *Audit committee meeting*, *Audit committee expertise*, dan *Audit committee size* dengan *Audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pengaruh karakteristik komite audit yang dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan peran sentral komite audit dalam mengurangi *audit report lag*.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus acuan dalam mencermati pelaksanaan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.

4. Bagi Penelitian Mendatang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai peran sentral komite audit dan pengaruhnya dalam mengurangi *audit report lag*.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka, bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian - penelitian empiris yang relevan dalam membangun hipotesis mengenai hubungan antara karakteristik Komite Audit dengan *Audit report lag*.
- BAB III : Metode Penelitian, bab ini menguraikan dan menjelaskan populasi, sampel yang digunakan dan teknik pengambilan sampel serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan model analisis untuk pengujian hipotesis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisisnya dalam rangka pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan keterbatasan serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Penelitian mengenai komite audit ini didasari oleh *agency theory* (teori keagensi). Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah hubungan antara pemilik dan pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen and Meckling, 1976)

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Ningsaptiti, 2010). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas dan adanya asimetri informasi antara *principal*

dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar *principal* dan *agen*. Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manager (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah ketidaksinambungan informasi yang dimiliki *principal* dan *agent*, ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen sebaliknya, *agent* memiliki lebih banya informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001 dalam Ningsaptiti, 2010).

Arrow (1985) dalam Purwati (2006) juga menjelaskan bahwa ada dua macam *agency problems* yaitu:

1. *Moral hazard*, adalah suatu keadaan saat pemegang saham sebagai *principal* tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai *agent* sudah membuat keputusan secara tepat, dan
2. *Adverse selection*, adalah suatu keadaan saat seorang *agent* membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh *principal* dimana hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. *Principal* dalam hal ini tidak bisa mengecek apakah informasi hasil pengamatan *agent* telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan yang baik sesuai kepentingan *principal*.

Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen. Pemilik selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka. Dengan adanya komite audit yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen yang dapat mengakibatkan *audit report lag*. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja manajemen sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 *Signaling Theory*

Teori *signaling* menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk (Hartono, 2005 dalam Chrisanty, 2010). Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik, serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk (Mengginson, 1981 dalam Chrisanty, 2010).

Teori *Signaling* berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten yang melakukan pengumuman . Perusahaan yang mempunyai keyakinan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik ke depannya akan cenderung mengkomunikasikan berita tersebut terhadap para investor (Mamduh Hanafi ,2004 dalam Chrisanty, 2010).

Manfaat utama teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik adalah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor. Semakin panjang *audit report lag* menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Investor dapat mengartikan lamanya *audit report lag* dikarenakan perusahaan memiliki *bad news* sehingga tidak segera mempublikasikan laporan keuangannya, yang kemudian akan berakibat pada penurunan harga saham perusahaan.

2.1.3 Komite Audit

Keberadaan Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEJ wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Jumlah Komisaris Independen proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Di bagian lain peraturan ini juga disebutkan bahwa Komisaris Independen sekaligus menjabat sebagai ketua Komite Audit. Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai Komite Audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
- b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2004 tanggal

24 September 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
- d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
- e. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

(Purwati, 2006)

2.1.3.1 Pengertian Komite Audit

Pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama *transparansi* dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003 dalam Purwati, 2006). Bursa Efek Jakarta (BEJ) menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/062000 dalam Purwati, 2006).

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep Good Corporate Governance yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengaawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (IKAI, 2010).

2.1.3.2 Struktur Komite Audit

Struktur Komite Audit di tiap negara tidak sama. Di Indonesia struktur Komite Audit diatur dalam Kep. Men. 117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang relevan. Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
2. Anggota komite audit yang merupakan Komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal Komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Adapun Persyaratan Keanggotaan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang member jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.

7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkannya kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau perusahaan public.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Hubungan yang erat antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris ini juga nampak dalam kewajiban pelaporan Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penggunaan yang diberikan (BEJ, 2001 dalam Purwati, 2006).

2.1.4 Independensi Komite Audit

Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit. Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat. Untuk menjamin independensi, Bapepam (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
4. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

2.1.5 Rapat Komite Audit

Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan

pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002 dalam Anggarini, 2010).

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran

diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Putra, 2010 dalam Anggarini, 2010).

2.1.6 Kompetensi : Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance*, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

New York Stock Exchange (Purwati, 2006) dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya, mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

Securities and Exchange Commission (Purwati, 2006) memberikan kriteria “*financial expert*” dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan
4. Pengalaman dalam pengendalian internal
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*)

2.1.7 Jumlah Anggota Komite Audit

Keanggotaan komite audit diatur dalam surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 dan Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Namun, keanggotaan komite audit di Indonesia bermacam-macam. Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal.

Namun, jumlah anggota komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini memunculkan pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi *audit report lag*, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan atau *power* yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty, 1993 dalam Abawayya 2010), menerima lebih banyak sumber daya (Pincus *et al.* 1989 dalam Hoitash dan Hoitash, 2007), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo *et al.*, 2003 dalam Abawayya 2010).

2.1.8 Laporan Keuangan

Menurut Weygandt dan Kieso, 2005 (dalam Sari, 2011) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang”.

Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 terdiri dari komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap disajikan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi (PSAK No.1, par.10).

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen kepada pihak luar perusahaan. Kualitas komunikasi yang dicapai tergantung pada kualitas laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009) No.1 adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

3. Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membenadinkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada investor mengenai kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik serta dalam rangka

mengikuti perkembangan pasar modal global, pada tanggal 5 Juli 2011 Bapepam mengeluarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Dalam Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 disebutkan laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Bapepam terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (neraca),
2. Laporan laba rugi komprehensif,
3. Laporan perubahan ekuitas,
4. Laporan arus kas,
5. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
6. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.9 Audit dan Standar Auditing

Terdapat banyak pengertian tentang auditing, diantaranya menurut Arrens *et al.* (2006) dalam Sari (2011) auditing adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person.”

Berdasar definisi di atas, dapat disimpulkan tiga elemen fundamental dalam auditing, yaitu (1) seorang auditor harus independen, (2) auditor harus bekerja mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatnya, dan (3) hasil pekerjaan auditor adalah laporan.

Audit pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu :

1. Audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*) adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit kepatuhan (*Compliance Audit*) adalah audit yang tujuannya menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang pembuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit operasional (*Operational Audit*) merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi

kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disajikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Standar umum, yaitu:

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat.

b. Standar pekerjaan lapangan, yaitu :

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten dalam pelaksanaan audit harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian saat dilakukan.

3. Bukti audit dikatakan kompeten jika diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar pelaporan, yaitu :

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan. Dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi.

Namun demikian, pemenuhan standar audit tidaklah mudah. Pemenuhan standar ini berdampak pada lamanya penyelesaian laporan audit. Selain itu, berdampak pula pada kualitas hasil laporan keuangan auditan. Kondisi ini dapat menimbulkan suatu dilema bagi auditor. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat

umum dan kepada Bapepam tergantung dari lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Semakin cepat pekerjaan audit selesai dilakukan, maka semakin cepat pula informasi dipublikasikan.

Manajemen perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan keuangan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevan dan keandalan kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan (IAI, 2001 dalam Sari, 2011).

Dyer dan McHugh, 1974 (dalam Sari, 2011) menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Para pemakai informasi akuntansi tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan pembuatan keputusan, tetapi informasi juga harus bersifat baru. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan.

2.1.10 Audit report lag

Ahmad dan Kamarudin (2002) menyatakan bahwa “*Audit report lag is the length of time from a company’s fiscal year end to the date of the auditor’s report*”. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut untuk dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi pasar terhadap keterlambatan informasi dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan.

Audit report lag merupakan aspek penting dalam menjaga relevansi dari informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut IAI (2009) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menjaga tingkat relevansi dari laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

IAI (2009) menyatakan bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ketepatan waktu menunjukkan laporan keuangan disajikan dalam kurun waktu teratur, untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi pemikiran jangka panjang investor dan keputusan pemakainya.

Ketentuan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 yang menjelaskan tentang penyampaian laporan

keuangan perusahaan dan laporan keuangan tahunan yang harus disertai dengan pendapat lazim dari auditor independenya yang disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Hossain dan Taylor (1998) menguji *audit report lag* di Pakistan dengan menggunakan sampel 103 perusahaan yang terdaftar di *Karachi Stock Exchange* tahun 1993. Dengan data yang diambil dari *annual report*, Hossain dan Taylor (1998) menemukan bukti empiris bahwa anak perusahaan multinasional berhubungan signifikan negatif dengan *audit report lag*, sedangkan variabel lainnya yaitu jenis industri, *debt to equity ratio*, KAP internasional, ukuran perusahaan (diproksikan logaritma total aset), profitabilitas dan *fee audit* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*.

Ahmad dan Kamarudin (2002) peneliti dari Malaysia, menggunakan sampel 100 perusahaan publik yang terdaftar di *Kuala Lumpur Stock Exchange* dengan tahun fiskal 1996-2000. Hasil penelitian menyatakan bahwa *audit report lag* yang lebih lama terjadi pada perusahaan: (1) industry nonfinansial, (2) mendapat opini audit selain *unqualified opinion*, (3) memiliki tahun fiskal yang berakhir selain 31 Desember, (4) diaudit oleh KAP *non Big Five*, (5) mengalami kerugian, (6) memiliki risiko yang lebih tinggi. Risiko diproksikan dengan proporsi total utang dengan total

aset. Sedangkan adanya pos-pos luar biasa dan ukuran perusahaan tidak terbukti berhubungan secara signifikan dengan *audit report lag*.

Purwati (2006) peneliti Indonesia menggunakan sampel 140 perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa, Independensi anggota komite audit, Ketua komite audit, serta Kompetensi : keahlian keuangan anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan Keanggotaan komite audit, Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Almosa dan Alabbas (2007) Meneliti perusahaan yang terdaftar di Saudi Stock Market (Tadawul) selama tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006, hasil penelitian ini menyatakan bahwa, *auditee size, profitability dan auditee sector* berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan *audit opinion* dan *auditor size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Ahmad dan Abidin (2008) meneliti semua perusahaan public yang terdaftar di bursa Malaysia pada tahun 1993, hasil penelitian ini menyatakan, analisis multivariat menunjukkan bahwa kepemilikan saham direktur, total aset, jumlah anak perusahaan , jenis perusahaan audit, opini audit dan laba atas ekuitas menjadi faktor penentu penting dari *audit report lag*. Hasil regresi untuk non-perbankan dan sektor keuangan juga sama.

Rachmawati (2008) menguji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di jakarta stock

exchange, hasil penelitian ini menyatakan, Faktor internal yang mempengaruhi *audit report lag* adalah size perusahaan dan faktor eksternal ukuran kantor akuntan public sedangkan variable profitabilitas, solvabilitas, internal auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*.

Nor *et al.*, (2010) meneliti tentang hubungan dari corporate governance dengan *audit report lag* pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2002, Audit committee size dan Audit committee meeting berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan Audit committee independence tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Hashim dan Rahman (2011) meneliti tentang komite audit dengan *audit report lag* pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2007-2009, penelitian ini menyatakan *Audit report lag* hanya dipengaruhi oleh variabel Audit committee independence dan Audit committee expertise, sedangkan variabel Audit committee meeting tidak berpengaruh terhadap *Audit report lag*.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Hossain dan Taylor (1998)	<i>An Examination of Audit report lag: Evidence from Pakistan</i>	a. Ukuran perusahaan b. <i>Debt to equity ratio</i> c. Profitabilitas d. Anak perusahaan internasional e. Ukuran KAP f. Fee audit g. Jenis industri	<i>Audit report lag</i> hanya dipengaruhi oleh variabel anak perusahaan multinasional, sedangkan variabel lainnya tidak terbukti berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> yang dialami perusahaan
2.	Ahmad dan Kamarudin (2002)	<i>Audit report lag and The Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence</i>	a. ukuran perusahaan b. jenis industri c. laba/rugi d. pos-pos luar biasa e. opini audit f. auditor g. tahun tutup buku h. proporsi utang	a. industri finansial, auditor dan tahun tutup buku berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . b. Kerugian, opini selain <i>unqualified opinion</i> , proporsi utang yang diprosikan dengan rasio total utang terhadap total asset berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> c. Ukuran perusahaan dan pos-pos luar biasa yang dilaporkan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .

3.	Purwati (2006)	<i>Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik yang Tercatat di BEJ</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Keanggotaan komite audit b. Independensi anggota komite audit c. Proporsi komisaris independen d. Ketua komite audit e. Kompetensi : keahlian keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keanggotaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>. b. Independensi anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>. c. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>. d. Ketua komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>. e. Kompetensi : keahlian keuangan anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.
4.	Almosa dan Alabbas (2007)	<i>Audit report lag: Evidence from listed joint stock companies in Saudi Arabia</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Auditee Size b. Profitability c. Auditee Sector d. Auditor Size e. Audit opinion (unqualified versus others) 	Auditee size, Profitability dan Auditee sector berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> , sedangkan Audit opinion dan auditor size tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .

5.	Ahmad dan Abidin (2008)	<i>Audit report lag of Listed Companies: A Case of Malaysia</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Industry classification b. Company size c. Number of subsidiaries d. Total of inventory and receivables divided by total assets e. Leverage f. ROE g. Ratio of client's directors' shareholding h. Type of company auditor i. Financial year date between 31 December to 31 March j. Audit opinion k. Auditor change 	Analisis multivariat menunjukkan bahwa kepemilikan saham direktur, total aset, jumlah anak perusahaan, jenis perusahaan audit, opini audit dan laba atas ekuitas menjadi faktor penentu penting dari <i>audit report lag</i> . Hasil regresi untuk non-perbankan dan sektor keuangan juga sama.
6.	Rachmawati (2008)	<i>Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit report lag dan Timeliness</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>profitability</i>, b. <i>internal auditor</i>, c. <i>solvability</i>, d. ukuran perusahaan, e. ukuran perusahaan f. akuntansi publik. 	Faktor internal yang mempengaruhi <i>audit report lag</i> adalah size perusahaan dan faktor eksternal ukuran kantor akuntan public sedangkan variable profitabilitas, solvabilitas, internal auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>audit report lag</i>

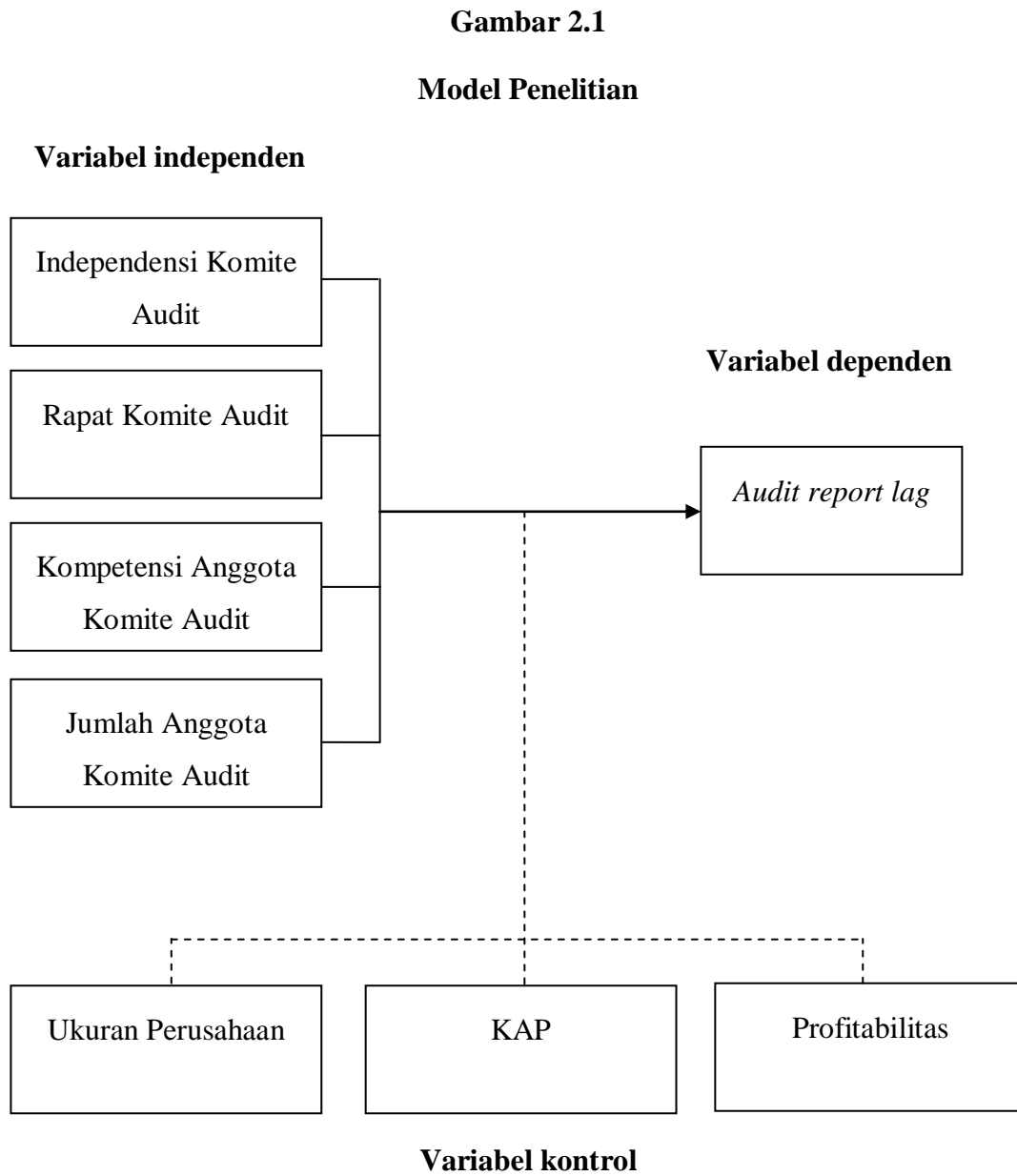
7.	Nor, Shafie dan Hussin (2010)	<i>Corporate Governance and Audit report lag in Malaysia</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit committee size b. Audit committee independence c. Audit committee meeting d. Audit committee financial expertise e. Board size f. Board independence g. CEO duality 	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit committee size berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> b. Audit committee independence tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> c. Audit committee meeting berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>.
8.	Hashim dan Rahman (2011)	<i>Audit report lag and the Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian Listed Companies</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit committee independence b. Audit committee meeting c. Audit committee expertise d. Company size e. Type of audit firm f. Profitability 	<i>Audit report lag</i> hanya dipengaruhi oleh variabel Audit committee independence dan Audit committee expertise, sedangkan variabel Audit committee meeting tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .

2.3 Model Penelitian

Berdasar uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi *audit report lag*. Faktor-faktor tersebut antara lain *audit committee independence*, *audit committee meeting*,

audit committee expertise, audit committee size, kerangka pemikiran dijelaskan pada

Gambar 2.1 sebagai berikut :



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Audit report lag*

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal anggota komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Purwati (2006), Nor *et al.*, (2010), dan Hashim dan Rahman (2011) menyatakan bahwa menyatakan bahwa audit committee independence berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Independensi Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.2 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap *Audit report lag*

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002).

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Nor *et al.*, (2010) menyatakan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Rapat Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.2 Pengaruh Kompetensi : Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit terhadap *Audit report lag*

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan bahwa salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan dipandang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan dalam hal ini kaitanya dengan *audit report lag*.

Purwati (2006) dan Hashim dan Rahman (2011) menyatakan bahwa Kompetensi : Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompetensi : Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.4 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap *Audit report lag*

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Namun, jumlah anggota komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini memunculkan pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi *audit report lag*, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan atau *power* yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty, 1993 dalam Abawayya 2010), menerima lebih banyak sumber daya (Pincus *et al.* 1989 dalam Hoitash dan Hoitash, 2007), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo *et al.*, 2003 dalam Abawayya 2010).

Purwati (2006) dan Nor *et al.*, (2010) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Jumlah Anggota Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam rangka menguji hipotesis yang telah diajukan, variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan variabel dependen *audit report lag* (AUDLAG) yang diukur dengan satuan hari. Pengertian *audit report lag* itu sendiri adalah jumlah hari antara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan audit. Selain yang tersebut di atas, *audit report lag* dapat juga diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Indonesia memiliki badan khusus yang mengatur batas waktu diterbitkannya laporan keuangan yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Perusahaan *go public* harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini kepada BAPEPAM dan mengumumkan kepada publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan atau dalam jangka waktu 90 hari. Variabel *audit report lag* diukur secara kuantitatif dari tanggal penutupan buku perusahaan hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Audit committee independence*, *Audit committee meeting*, *Audit committee expertise*, dan *Audit committee size*.

3.1.2.1 *Audit committee independence* (INDEP)

Independensi komite audit pada penelitian ini merupakan keadaan dimana para anggota dari komite audit harus diakui sebagai pihak independen. Anggota komite audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada perusahaan tercatat. Selain itu, para anggota komite audit juga tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap perusahaan tercatat atau direksi atau komisaris perusahaan tercatat serta harus bebas dari keadaan yang menyebabkan pihak lain meragukan sifat independensinya. Variabel ini diukur dari proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar Emiten dengan jumlah anggota Komite Audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta Direktori Pasar Modal Indonesia.

3.1.2.2 *Audit committee meeting* (RAPAT)

Komite audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Komite Audit oleh Bapepam menyebutkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun untuk mendiskusikan

pelaporan keuangan dengan auditor eksternal. Variabel ini diukur dari berapa kali komite audit melakukan rapat dalam satu tahun. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta Direktori Pasar Modal Indonesia.

3.1.2.3 *Audit committee expertise (KOMPT)*

Sesuai peraturan Bapepam tentang komite audit bahwa perusahaan wajib memiliki setidaknya 3 (tiga) orang anggota komite audit, salah satunya adalah komisaris independen, yang bertindak sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya harus pihak independen yang salah satunya harus mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan (*financial expertise*). Komite audit yang terdiri dari paling tidak satu anggota yang memiliki keahlian di bidang financial akan lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material. Variabel ini diukur dari proporsi anggota Komite Audit yang kompeten dengan jumlah anggota Komite Audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta Direktori Pasar Modal Indonesia.

3.1.2.4 *Audit committee size (ANGGT)*

Berdasarkan Surat Edaran dari direksi PT.Bursa Efek Indonesia No.SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 serta Pedoman Pembentukan Komite Audit menurut Bapepam perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa

anggota komite audit sekurang-kurangnya 3(tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Variabel ini diukur dari jumlah anggota Komite Audit yang ada dalam satu perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta Direktori Pasar Modal Indonesia.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, karena variabel ini diduga ikut berpengaruh terhadap variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan (SIZE)

Variabel ini diukur dengan Natural Log total asset perusahaan pada saat tutup tahun.

3.1.3.2 Ukuran KAP (KAP)

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor Big 4, dan 0 jika sebaliknya.

3.1.3.3 Profitabilitas (PROF)

Variabel ini diukur dengan rasio ROA, yaitu rasio yang didapat dari perhitungan total pendapatan dibagi dengan total asset.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan rangkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 yang berjumlah 402 perusahaan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel acak berstrata proporsional, yaitu pengambilan sampel yang melibatkan proses stratifikasi atau segresi, yang diikuti dengan pengambilan acak subjek dari setiap strata berdasarkan proporsi yang telah ditentukan (Sekaran, 2006). Strata yang digunakan adalah jenis-jenis industri perusahaan.

Untuk menentukan jumlah sampel yang dapat menggambarkan seluruh populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel yang diinginkan

N = ukuran populasi

e = batas ketelitian yang diinginkan (signifikansi sebesar 5%)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topic pembahasan dari penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Sumber-sumber dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2006).

Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah ujinormalitas, uji multikolenieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006).

Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui :

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normal residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, dengan hanya melihat histogram dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal serta tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data, dapat pula dilakukan melalui analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 = Data residual terdistribusi normal.

H_1 = Data residual tidak terdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut :

- a. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

3.5.2.2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2006) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum adalah:

1. Jika nilai *Tolerance* >10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *Tolerance* < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3.5.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser. Untuk mengetahui tidak adanya heteroskedastisitas ditunjukkan dengan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual (AbsRes). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 persen

3.5.3 Analisis Regresi

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$\text{AUDLAG} = \beta_0 + \beta_1\text{AUDLAG} + \beta_2\text{INDEP} + \beta_3\text{RAPAT} + \beta_4\text{KOMPT} + \beta_5\text{ANGGT} + \beta_6\text{SIZE} + \beta_7\text{KAP} + \beta_8\text{PROF} + e$$

dimana:

β_0 = Konstanta

AUDLAG = *Audit report lag*, diartikan jumlah hari antara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan audit, dihitung secara kuantitatif per hari.

INDEP = Independensi komite audit, diukur dari jumlah anggota komite audit yang berasal dari luar emiten

RAPAT = Jumlah rapat komite audit, diukur dari jumlah rapat komite audit

KOMPT = Kompetensi anggota komite audit, diukur dari jumlah anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan finansial

ANGGT = Jumlah anggota komite audit, diukur dari jumlah anggota komite audit

SIZE = Ukuran perusahaan, diukur dari natural log total asset perusahaan

KAP = Kualitas Auditor, diukur dari apakah KAP termasuk big 4 atau bukan big 4

PROF = Profitabilitas, diukur dari analisis rasio ROA perusahaan

e = Kesalahan residual / *error*

3.5.3.1 Uji Hipotesis Analisis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0.05 , maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

3.5.3.2 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Penelitian ini menggunakan nilai *adj R²* karena mampu mengatasi bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi. Nilai *Adj R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2006).

3.5.3.3 Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan

atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $< \alpha$, maka hipotesis diterima. Jika nilai probabilitas signifikansi $> \alpha$, maka hipotesis ditolak.